BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, memberikan peluang kepada berbagai industri untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Hal ini diatur oleh pemerintah melalui UU Nomer 41 Tahun 1999 Pasal 19 untuk mengatur tentang perubahan dan luas kawasan hutan lindung, serta batasan terkait daerah perhutanan dan daerah pertambangan. Beberapa industri yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam adalah industri pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, di mana mereka saling memiliki pengaruh antara satu dengan yang lain terkait luas perbatasan antar industri. Dalam perkembangannya, jenis industri ini banyak mengalami tantangan. Misal, pada tahun 2015 luas daerah pertambangan di Indonesia mengalami penyempitan, hal ini dikarenakan luas daerah pencarian, penambangan, pengolahan, dan pemanfaatan sudah semakin kecil. Di tahun 2015 harga komoditas juga mengalami kenaikan yang mengakibatkan turunnya pendapatan dari sektor pertambangan (O'Callaghan, 2015).

Penurunan pendapatan di dalam perusahaan akan dapat menyebabkan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*, dan apabila kondisi *financial distress* dialami perusahaan setiap periodenya akan dapat menyebabkan perusahaan mengalami

kebangkrutan. Platt dan Platt (2006) menyatakan bahwa *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor dan terjadi sebelum perusahaan mengalami likuidasi. *Financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *interest coverage ratio* yaitu rasio pembagian antara laba usaha perusahaan dengan beban bunga perusahaan selama satu periode (Mayangsari, 2015). Semakin rendah rasio yang dihasilkan maka dapat menunjukkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. *Financial distress* dapat terjadi di dalam industri pertambangan, perhutanan, dan perkebunan dikarenakan adanya keterbatasan dan penyempitan luas daerah pengelolaan sumber daya alam. Daerah pertambangan memiliki kesamaan dengan daerah perhutanan dan perkebunan, dalam industri perhutanan dan perkebunan kandungan mineral yang terdapat dalam tanah akan dapat habis apabila digunakan secara bertahap untuk kegiatan operasi.

Berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalisasi kondisi *financial distress*. Menurut Hadi (2014), salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat menghindari *financial distress* adalah dengan adanya *Corporate Governance* (CG) yang efisien dan efektif. *Corporate governance* adalah suatu sistem yang menyangkut struktur, pembagian tugas, tanggung jawab, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing bagian yang membentuk struktur perseroan. Untuk tercapainya *corporate governance* yang baik dapat melalui

mekanisme *corporate governance*, yang dimana dalam penelitian ini mencakup ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan insitusal, ukuran komite audit serta kompetensi komite audit.

Dewan direksi bertugas untuk menjadi penengah antara *stakeholder* dan manajemen dalam pengambilan keputusan yang ada di dalam perusahaan. Wardhani (2006) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi di sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula kondisi tekanan keuangan yang dialami perusahaan. Menurut Mayangsari (2015), dewan komisaris independen bertugas sebagai penengah berbagai permasalahan yang timbul karena perbedaan kepentingan dan tujuan *stakeholder* dan manajemen. Dewan komisaris juga bertugas dalam mengawasi tindakan manajemen untuk menggunakan asset perusahaan dengan semena-mena serta melindungi *stakeholder* dari tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya dewan komisaris maka masalah keagenen yang timbul di dalam perusahaan dapat diminimalkan.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham biasa yang dimiliki oleh manajemen, komisaris, direksi, dan karyawan. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan menjadikan manajemen sebagai pemilik dan pengelola perusahaan, sehingga manajemen akan mempunyai dua tanggung jawab dan hak yang berbeda. Mayangsari (2015) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial dapat menjadi salah satu kekurangan dalam pengendalian yang ada di

dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan perusahaan sesuai dengan keinginan manajemen. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh suatu organisasi atau badan usaha. Kepemilikan institusional akan dapat membantu terlaksananya kegiatan *corporate governance* dengan efektif dan efisien. Bodroastuti (2009, dalam Putri dan Merkusiwati, 2014) berpendapat bahwa kepemilikan institusional atau investor dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan sehingga dapat meminimalkan tindakan manajemen untuk kepentingan pribadi dan kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan penggunaan aset perusahaan.

Untuk membantu berjalannya *corporate governance* dewan komisaris dibantu oleh komite audit untuk mengawasi kegiatan operasional dan tindakan yang dilakukan oleh manajerial. Komite audit dapat mengevaluasi dan memberikan masukan perbaikan untuk kegiatan operasional dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Menurut Hadi (2014), semakin besar dan berkembangnya perusahaan akan membutuhkan adanya komite audit yang semakin besar. Dengan dibentuknya komite audit oleh dewan komisaris diharapkan dapat terlaksananya *good corporate governance* dan struktur pengendalian internal yang efektif dan efisien. Untuk menilai tindakan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh komite audit diperlukan adanya kompetensi komite audit.

Kompetensi komite audit merupakan kriteria, latar belakang pendidikan, dan pengalaman dibidang auditing. Berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi auditor menyatakan bahwa kompetensi auditor adalah: ”ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.” Dengan adanya kompetensi auditor akan dapat mendukung terlaksananya *good corporae governance*.

Cinanta dan Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa CG memiliki pengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Dengan adanya CG dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi risiko perusahaan hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mayangsari (2015) yang menyatakan bahwa CG tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya kondisi *financial distress*. Salah satu risiko perusahaan adalah *financial distress*. Dalam penelitian ini, mekanisme CG yang akan digunakan adalah dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit.

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan juga memiliki berbagai tanggung jawab terlepas dari kegiatan usahanya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomer 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan tingkungan perseroan terbatas, pemerintah menetapkan dan mengharuskan setiap perusahaan di Indonesia untuk

melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga dan mengelola lingkungan sekitar dan membangun hubungan dengan masyarakat. Demikian juga industri pertambangan, perhutanan, dan perkebunan memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam sebagai persediaan, diharapkan dapat merestorasi daerah yang telah digunakan sebagai wilayah industri. Menurut Purwaningsih (2014) yang menyatakan bahwa CSR memiliki hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi pelaksanaan CSR di dalam perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan juga akan semakin tinggi. Akan tetapi menurut Mustafa (2012), menyatakan bahwa CSR tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kondisi *financial distress* tidak disebabkan seberapa besar perusahaan melakukan tindakan CSR.

Penelitian ini menduga bahwa *corporate governance* dan *corporate social responsibility* akan mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang pada akhirnya menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Kinerja keuangan sebagai salah satu faktor internal perusahaan merupakan indikasi mengenai kesehatan dan kondisi kinerja sebuah perusahaan dalam suatu periode. Kinerja keuangan juga seringkali digunakan oleh perusahaan sebagai prediksi dan dasar pengambilan keputusan di masa depan. Dalam menilai kesehatan dan kondisi kinerja keuangan perusahaan, dalam penelitian ini akan menggunakan rasio keuangan likuiditas, yang akan digunakan

sebagai mediasi dalam menilai pengaruh antara CSR dan CG terhadap kondisi *financial distress*.

Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005:118), Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang mudah dan cepat untuk diubah menjadi kas, dan semakin tinggi rasio likuiditas sebuah perusahaan maka akan meminimalkan kondisi terjadinya *financial distress*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menunjukkan bahwa apabila kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan setiap periodenya maka akan membawa perusahaan ke dalam kondisi *financial distress*.

Penelitian ini dilakukan pada industri pertambangan, perhutanan, dan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 3 tahun. Perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan mulai sebesar 37% dari tanggal 31 Desember 2014 sampai tanggal 31 Desember 2015 (Winzenried, 2015). Pada tahun 2014 perusahaan pertambangan sektor batu bara juga mengalami kondisi *financial distress* yang diakibatkan turunnya permintaan dan harga batu bara (Soetikno, 2015).

Dalam penelitian ini periode penelitian mulai dari tahun 2013 hingga 2015, tahun penelitian digunakan selama 3 tahun dikarenakan antara tahun 2014 hingga 2015 sebagian besar perusahaan pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan yang ada di Indonesia mengalami *financial distress* dan setiap tahunnya luas

kawasan hutan juga mengalami penyempitan. Tidak hanya industri pertambangan yang mengalami penurunan dan permasalahan pada tahun 2013 hingga 2015. Kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, hampir 2 juta hektar per tahun. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah rusak dan rusak, yang mengakibatkan luas hutan di Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang 64 juta hektar. Dengan berkurangnya luas hutan di Indonesia dapat menyebabkan dampak negatif bagi industri kehutanan dan perkebunan di Indonesia (Rahman, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai mediasi.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian umum sebagai berikut :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan pertambangan, perhutanan dan perkebunan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan pertambangan, perhutanan dan perkebunan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kondisi *financial distress* perusahaan pertambangan, perhutanan dan perkebunan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi.
2. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kondisi *Financial Distress* perusahaan pertambangan, perhutanan dan perkebunan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta memberikan informasi kepada mahasiswa dalam bidang ilmu akuntansi terkait dengan mekanisme *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kondisi *financial distress* dalam perusahaan pertambangan, perhutanan dan perkebunan, serta dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada perusahaan pertambangan, kehutanan dan perkebunan mengenai pentingnya pelaksanaan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* untuk meminimalkan terjadinya konflik antara principal dengan

agen di dalam perusahaan untuk menghindari risiko terjadinya *financial distress*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang dijadikan sebagai dasar untuk mencari penyelesaian masalah, pengembangan hipotesis dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai desain penelitian, definisi dan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.